J U R N A L PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Volume 13 Nomor 1/2020

Naskah diterima: 13 Maret 2020;

direvisi akhir: 16 September 2020;

disetujui: 23 September 2020 EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD) TAHUN 2019

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF OPERATIONAL ASSISTANCE FUND FOR THE MANAGEMENT OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION (BOP PAUD) IN 2019

Sudiyono¹ Yunita Murdiyaningrum²

Pusat Penelitian Kebijakan^{1,2} Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud e-mail: sudiyono d@ymail.com

DOI: 10.24832/jk.v15i1.341

ABSTRACT

This study aimed to examine the effectiveness of the Operational Assistance Fund (BOP) for Early Childhood Education in 2019. The research method used in the study was descriptive analysis. Data was collected through secondary sources, distributing questionnaires online using Google forms, and Focus Group Discussion. The study was conducted in 12 regencies/ cities both in Java and outside Java, selected using random sampling method. The selection criteria was areas receiving the largest, smallest, and average amount of BOP fund. The results showed that the BOP for the Implementation of Early Childhood Education in all sample regions was quite effective in helping operational costs, increasing learning activities, and alleviating the financial burden on parents, but the schedule for funds delivery was not timely and the use of funds was not in accordance with technical guidelines. Contribution of Operational Assistance Funds for Early Childhood Education for Playgroups was 59%, Similar Early Childhood Education Units were 56%, Kindergarten 33% and Child Care Centers by 29%. It can be concluded that the BOP fund in the Implementation of Early Childhood Education was quite effective in helping operational costs, increasing learning and alleviating the burden on parents, and contributing significantly to the operational costs of Early Childhood Education. However, the promptness of fund delivery in line with the schedule and the use of funds in accordance with the guidelines still need to be reviewed and improved.

Key words: Effectiveness, PAUD, Utilization of PAUD BOP funds

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, penyebaran kuesioner secara online menggunakan qoogle form, dan Diskusi Kelompok Terpumpun. Penelitian dilaksanakan di 12 wilayah kabupaten/kota di Jawa dan luar Jawa dengan metode stratified random sampling dengan kriteria jumlah wilayah penerimaan Bantuan Operasional Pendidikan kategori besar, sedang dan kecil. Hasil penelitian menunjukkan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di semua wilayah sampel cukup efektif dalam membantu biaya operasional, meningkatkan kegiatan pembelajaran, dan meringankan beban pembiayaan orang tua siswa, namun penerimaan dana belum tepat waktu dan pemanfaatan dana juga belum sesuai dengan petunjuk teknis. Kontribusi dana Bantuan Operasional Penyelenggeraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain sebesar 59%, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis sebesar 56%, Taman Kanak-kanak 33% dan Tempat Peneitipan Anak sebesar 29%. Kesimpulan penelitian yaitu Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini cukup efektif dalam membantu biaya operasional, meningkatkan pembelajaran dan meringankan beban orangtua, dan berkontribusi cukup besar dalam biaya operasional Pendidikan Anak usia Dini. Ketepatan waktu penerimaan dana dan kesesuaian penggunaan dana perlu mendapat perhatian.

Kata kunci: Efektivitas, PAUD, Pemanfaatan dana BOP PAUD

PENDAHULUAN

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat ini semakin banyak diminati oleh masyarakat. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya PAUD dalam tumbuh kembang anak. Indikasinya adalah semakin bertambahnya jumlah PAUD dan jumlah siswa pada setiap tahunnya. Berdasarkan data Dapodik tahun 2019, jumlah satuan PAUD sebanyak 203.013, terdiri dari Taman Kanakkanak (TK) sejumlah 93.024, Kelompok Bermain (KB) sejumlah 84.584, Tempat Penitipan Anak (TPA) sejumlah 2.988, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) sejumlah 22.417 satuan. Tren peningkatan jumlah PAUD untuk TK tahun 2015 yang berjumlah 86.868 kemudian tahun 2017 bertambah menjadi 92.035 dan tahun 2019 menjadi 93.024. Demikian pula untuk jenis PAUD lainnya untuk kelompok bermain (KB) tahun 2015 sebanyak 77.838 dan tahun 2019 bertambah menjadi 84.584. Hal ini menunjukkan masyarakat semakin peduli terhadap pentingnya PAUD dengan memberikan pendidikan sejak usia dini guna memberikan rangsangan motorik agar anak-anak mereka berkembang dengan baik sesuai dengan perkembangan usianya.

Keberadaan PAUD saat ini sebagian besar diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Data Dapodik tahun 2019 menunjukkan bahwa TK yang merupakan satuan PAUD terbanyak saat ini sebagain besar atau sebanyak 95,7% diselenggaran oleh swasta. Banyaknya jumlah PAUD yang didirikan oleh masyarakat sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan akses PAUD. Namun, keberadaan PAUD tersebut juga perlu dikontrol terkait dengan standar pelayanan minimal yang merupakan tuntutan standar layanan yang perlu diupayakan terus menerus. Hal itu perlu diwujudkan dalam penyelenggaraan PAUD agar kualitas layanan PAUD bagi anak usia 0-6 tahun yang merupakan usia emas (the golden age) merupakan yang terbaik mengingat perannya dalam

menumbuhkembangkan generasi muda penerus bangsa yang berkualitas.

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD patut dihargai. Pemberian dana-dana stimulus untuk penguatan kelembagaan, seperti block grant, dana rintisan dan dana stimulan lainya telah menjadi dorongan yang kuat bagi masyarakat untuk mendirikan PAUD. Pada satu sisi, hal ini menguntungkan karena dapat meningkatkan akses layanan PAUD, tetapi hal ini juga akan merugikan apabila izin pendirian PAUD tidak mengacu pada syarat-syarat sesuai aturan yang berlaku pada standar minimal, utamanya terkait dengan sarana-prasarana dan tenaga pengajar yang kompeten. Dengan demikian, masih diperlukan kontrol terhadap kualitas dari setiap PAUD yang akan didirikan.

Seiring dengan tingginya minat masyarakat pada satuan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas memperluas layanan PAUD berkualitas melalui ketersediaan Satuan PAUD yang mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan akses PAUD. Melalui dukungan pemerintah Pusat, Daerah, serta masyarakat, diharapkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dapat meningkat pada setiap tahunnya. Di tahun 2017/2018, APK PAUD mencapai 74,28%, (Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Hal ini menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam mengakses PAUD.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan PAUD agar dapat diakses oleh masyarakat luas dengan biaya murah, salah satunya dengan memberikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD). Tahun 2019 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,47 triliun untuk bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD). Jumlah tersebut naik 10% dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp 4,07 triliun. Tujuan BOP adalah meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu, agar mereka memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. Program BOP ditujukan kepada anak usia 0-6 tahun, dengan prioritas anak dari keluarga kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan layanan khusus.

Peningkatan anggaran BOP PAUD tahun 2019 juga disertai dengan perubahan mekanisme penyaluran dana. Jika pada tahun 2018 menggunakan satu tahap penyaluran, pada tahun tahun 2019 menggunakan dua tahap

64

penyaluran. Dengan perubahan mekanisme menjadi dua tahap penyaluran diharapkan program BOP PAUD menjadi lebih baik.

Hasil survei Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 terkait pelaksanaan program PAUD menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya: 1) pengetahuan dan pemahaman satuan PAUD terhadap petunjuk teknis BOP PAUD masih rendah, 2) sosialisasi batas waktu melengkapai data pada operator masih kurang, dan 3) kesulitan dalam pemanfaatan dana BOP PAUD. Permasalahan tersebut tentu dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu penerimaan dana, pemanfaatan dana, dan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di PAUD.

Sementara dari hasil penelitian Subagyo Rahayu tentang Implementasi Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) di TK negeri di Kabupaten Sleman tahun 2019 (STIE Widya Wiwaha, 2019) menunjukkan bahwa terkait dengan transparansi dan akuntabilitas lembaga, tahap pelaksanaan belum sesuai dengan juknis BOP PAUD. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama penghambat implementasi program BOP PAUD pada TK negeri di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana ketepatan waktu penerimaan dana BOP di satuan PAUD? 2) bagaimana pemanfaatan dana yang dilakukan oleh satuan PAUD? 3) bagaiamana dampak BOP PAUD dalam pembelajaran? dan 4) bagaimana kontribusi BOP PAUD dalam penyelenggaraan PAUD?

Mengacu pada rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas BOP PAUD terkait dengan 1) ketepatan waktu penerimaan, 2) pemanfaatan dana, 3) dampak BOP dalam penyelenggaraan PAUD, dan 4) kontribusi BOP dalam biaya penyelenggaraan PAUD.

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian stimulus pendidikan agar membantu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara jasmani maupun rohani, sehingga anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Martinis Yamin & Jamilah, 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Pasal 1 ayat 14).

Tujuan PAUD secara khusus, yaitu (1) membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, (2) mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial anak pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan (Trianto, 2011).

Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal berbentuk kelompok bermain (KB) dan taman penitipan anak (TPA), sedangkan PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan lingkungan seperti bina keluarga balita dan posyandu yang terintegrasi PAUD atau yang kita kenal dengan satuan PAUD sejenis (SPS) (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003).

2. Aspek-Aspek Perkembangan Anak Usia Dini

Menurut para ahli terdapat empat aspek perkembangan anak usia dini yaitu perkembangan fisik, kognitif, sosio-emosional, dan perkembangan bahasa.

a. Perkembangan Fisik

65

Perkembangan fisik ditandai dengan bertambahnya tinggi badan dan berat badan. Anak dapat mengalami perkembangan tinggi

badan 6 cm dan berat badan 2-kg pertahun. Namun, pola pertumbuhan anak bervariasi secara individual, yang dipengaruhi oleh faktor bawaan, defisiensi hormon pertumbuhan dan masalah fisik yang terjadi pada masa kanakkanak (Santrock (2011). Perkembangan tinggi dan berat badan juga diiringi oleh perkembangan otak, motorik kasar, dan motorik halus.

1) Perkembangan otak

Pertumbuhan fisik otak mencapai 50% pada usia 2 tahun, dan 90% pada usia 6 tahun, dan mencapai pertumbuhan optimalnya (100%) pada usia 12 tahun. Sedangkan untuk perkembangan intelektual otak mencapai 50% pada usia 4 tahun, mencapai 80% usia 8 tahun, dan kondisi optimal perkembangan intelektual tercapai pada usia 18 tahun (Keith Osborn, Burton L. White, dan Benjamin S. Bloom (dalam Jamaris, 2013).

Jaringan sel otak (sinapsis) anak berusia 3 tahun, jumlahnya trilyunan, jaringan yang iarang digunakan akan mati, sedangkan yang sering digunakan akan semakin kuat dan permanen Suyadi (2010). Sel-sel otak berkembang mengikuti pengalaman, oleh sebab itu, anak perlu diberikan berbagai rangsangan (stimulus) dan memfasilitasi perkembaangan agar otak dapat tumbuh optimal (Masnipal, 2013:80). Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan otak: a) faktor genetik; menentukan ukuran, struktur konektivitas saraf, meskipun berbeda masih dapat berfungsi normal, hanya perbedaan genetik tertentu yang bisa mengakibatkan ketidaknormalan, b) stimulasi lingkungan, c) nutrisi, d) steroid, sekelompok hormon dan d) teratogen, zat asing misalnya alkohol dan virus yang dapat menyebabkan ketidaknormalan pada janin (Byrnes dalam Schunk, 2012: 69).

2) Motorik kasar

Motorik kasar adalah gerak anggota badan secara kasar atau keras, semakin anak bertambah dewasa dan kuat tubuhnya, maka gaya geraknya semakin sempurna (Laura E. Ber dalam Suyadi, 2010). Contoh gerakan motorik kasar adalah melakukan gerakan berjalan, berlari, melompat, melempar dan sebagainya.

3) Motorik halus

Motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat (Bambang Sujiono, 2012). Motorik merupakan gerakan vang menggunakan gerakan otot-otot halus atau anggota sebagian tubuh tertentu, yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Gerakan itu misalnya menindahkan benda dari tangan, mencoretcoret, menggunting, melipat kertas, menulis dan lain-lain (Siti Aisah dkk, 2011) Kesimpulannya, perkembangan motorik halus adalah perkembangan fisik-motorik jasmaniah melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf dan otot yang terkoordinasi dalam melakukan suatu gerakan melalui belajar dan berlatih.

b. Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif terdiri atas dua bidang, yakni logika-matematika dan sains. Untuk meningkatkan kemampuan kognitif. anak dilatih meningkatkan pengertian pada bilangan, menemukan hubungan sebab akibat dan meningkatkan kemampuan berpikir logis (Suyadi, 2010). Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Proses berpikir yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa (Ahmad Susanto, 2011). Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan (intelegensi) yang menandai seseorang dengan berbagai minat terutama sekali ditujukan kepada ide-ide belajar.

c. Perkembangan Sosio-Emosional

66

Perkembangan sosio-emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari hari (Suyadi, 2010). Untuk dapat mengembangkan atau mencerdaskan sosio emosional anak, diberikan stimulus melalui permainan yang sesuai dengan tingkat perkembangan sosio emosional anak. Pola perkembangan sosio emosional anak usia dini di antaranya: takut, malu, khawatir, cemas, marah, cemburu, duka cita, rasa ingin tahu, dan kegembiraan.

Nilai-nilai yang ditanamkan agar sosioemosionalnya tumbuh dan berkembang dengan baik, di antaranya: a) mengembangkan empati dan kepedulian, b) menanamkan sikap optimis yang merupakan hasil kebiasaan berfikir positif, c) memberikan kebebasan terhadap anak untuk mecahkan masalah, dan d) menumbuhkan motivasi.

d. Perkembangan Bahasa

Kemampuan berbahasa anak berkembang pesat pada masa prasekolah. Anak belajar bahasa secara intuitif tanpa banyak instruksi. Hasilnya adalah terus bertambahnya kosakata, jumlah kata yang diketahui anak, dan penggunaan kalimat yang panjang, serta tata bahasa yang terus berkembang (Morrison, 2008).

Tahapan perkembangan bahasa anak prasekolah sebagai berikut: a) Memahami fonologi dan morfologi; anak lebih sensitif terhadap bunyi bahasa lisan. Dalam morfologi, anak bisa diajarkan kata baru tanpa pengetahuan sebelumnya. b) Perubahan dalam sintaksis dan semantik; anak dapat menyusun kata bersamaan dengan perkembangan kosakatanya. c) Kemajuan dalam pragmatik; anak dapat mengubah gaya bicara sesuai situasi. d) Kemampuan membaca (Santrock 2011).

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik BOP PAUD

Operasional Bantuan Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu, agar mereka memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. Sesuai dengan fokus PAUD bagi anak usia 0-6 tahun, yang menjadi prioritas adalah anak dari keluarga kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan layanan khusus. Alasan pentingnya BOP bagi PAUD ialah sebagai berikut: a) Alasan pendidikan; PAUD merupakan pondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah. b) Alasan ekonomi; PAUD merupakan investasi yang menguntungkan baik bagi keluarga maupun pemerintah. c) Alasan sosial; PAUD merupakan salah satu upaya untuk menghentikan roda kemiskinan. d) Alasan hak/ hokum; PAUD merupakan hak setiap anak

untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang (UNESCO dalam Rahayu Nur'aini, 2015).

Dalam petunjuk teknisnya, prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD meliputi:

- a. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD.
- d. Adil, yaitu semua anak baik laki-laki maupun perempuan memperoleh hak yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan anak usia dini.
- e. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan.
- f. Kepatutan, yaitu penjabaran program/ kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- g. Manfaat, yaitu pelaksanaan program/ kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal.

Sasaran program DAK Non-fisik BOP PAUD meliputi Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal dengan peserta didik yang terdata dalam data pokok PAUD dan pendidikan masyarakat (Dapodik PAUD dan Dikmas). Penggunaan DAK Non-fisik BOP PAUD mencakup tiga komponen yaitu kegiatan pembelajaran dan bermain, kegiatan pendukung, dan kegiatan lainnya. Penggunaan tiga komponen tersebut telah ditentukan dalam juknis dengan besaran presentasi yaitu minimal 50 persen untuk kegiatan pembelajaran dan bermain; maksimal

35 persen kegiatan pendukung; dan maksimal 15 persen untuk kegiatan lainnya.

Dana BOP PAUD digulirkan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu PAUD, karena mutu pendidikan merupakan suatu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pihak lembaga dalam menciptakan anak didik yang berkualitas (Rahayu, 2015). Sekolah/lembaga dapat dikatakan bermutu apabila di dalam sekolah/lembaga tersebut terdapat proses pembelajaran yang baik, serta mempunyai lembaga atau badan-badan sekolah yang mampu menangani dan bertanggung jawab atas hasil belajar anak didiknya.

Mutu pendidikan merupakan dasar suatu kesuksesan sekolah/lembaga menghasilkan murid yang berkualitas. Orang tua sangat tertarik dengan sekolah/lembaga yang mampu memberikan mutu kepada anak mereka. Hal ini yang mendorong pihak sekolah untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Sekolah/lembaga akan lebih berkualitas atau bermutu apabila mempunyai guru atau tenaga pendidik yang terlatih. Guru yang terlatih dapat memahami dan menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi mengenai persoalan murid yang berusia di bawah umur 6 tahun. Menurut Muhson (dalam Rahayu 2015), peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, pelatihan dan pendidikan, ataupun dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran dan nonpembelajaran secara professional lewat penelitian tindakan secara terkendali.

Evaluasi dana BOP PAUD mengacu pada ketentuan pendanaan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat meliputi biaya investasi satuan pendidikan, biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, biaya operasi satuan pendidikan (biaya personalia dan biaya nonpersonalia), biaya operasai penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.

Data yang digunakan untuk menganalisis kajian efektivitas dana BOP PAUD bersumber dari jumlah anak usia dini yang terlayani dan jumlah dana BOP PAUD yang diberikan oleh Pemerintah

68

Pusat. Pengalokasian besaran DAK Nonfisik BOP PAUD dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah menggunakan perhitungan sebagai berikut:

- Jumlah peserta didik yang dilayani Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang tercatat pada Dapodik PAUD dan Dikmas per akhir bulan Juli tahun anggaran sebelumnya; dan
- Satuan biaya BOP PAUD sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun (Petunjuk teknis BOP-PAUD 2019).

4. Efektivitas Program

Pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi (Gibson et.al dalam Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai, 2013). Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka dinilai semakin lebih efektif. Berdasarkan pengertian tersebut, dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian dapat diidentifikasikan tiga tingkatan analisis yaitu: (1) individu, (2) kelompok, dan (3) organisasi. Ketiga tingkatan analisis tersebut sejalan dengan ketiga tingkatan tanggung jawab manajerial yaitu bahwa para manajer bertanggung jawab atas efektivitas individu, kelompok dan organisasi.

Efektivitas juga dimaknai sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran (Etzioni, dkk dalam Hamzah, 2013). Dalam pandangan ini, jika suatu program telah mencapai target sesuai tujuan yang diharapkan, dapat dikatakan sudah efektif. Efektivitas juga didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Komaruddin, 2010). Pada dasarnya, dalam memaknai efektivitas setiap orang dapat memberi arti yang berbeda sesuai sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan di dalam suatu program kegiatan. Suatu program dikatakan efektif apabila tujuan tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Emerson).

5. Penelitian Terkait

- a. Waluyo Basuki, dkk, Evaluasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-fisik BOP PAUD di Jawa Tengah Tahun 2018. Hasil penelitian Program DAK Non-fisik BOP PAUD membantu lembaga PAUD dalam pemenuhan biaya operasional nonpersonalia. Penggunaan dana sebesar 60% digunakan untuk biaya operasional dan 40% digunakan untuk biaya nonoperasional. BOP PAUD meringankan beban orang tua. Penerimaan BOP tidak tepat waktu.
- b. Emilda Sulasmi, Evaluation of the Operational Assistance Management Funding Program (BOP) at The Bengkulu City PAUD Institution. Hasil penelitian menyatakan bahwa BOP tepat sasaran dalam membantu meringankan beban orang tua, BOP meningkatkan mutu PAUD, dan penyaluaran dana sesuai juknis.
- c. Erfy Melani Lalupanda: Evaluasi Implementasi Program BOP PAUD. Hasil penelitian di antaranya adalah terdapat kesenjangan pada implementasi program BOP PAUD pada proses perencanaan, penyaluran dana, dan pelaporan pertanggung jawaban.
- d. Felayati dan Yaswinda; Penerapan Model Evaluasi CIPPO dalam Mengevaluasi Penyelenggaraan Lembaga PAUD: Hasil penelitian terhadap implementasi Peraturan Menteri No.146 dan No. 137 tahun 2014 menunjukkan bahwa peraturan tersebut sudah terlaksana namun belum optimal, utamanya pada bagian sarana prasarana pendidikan.
- e. Florentina Reni Swastika, Indarja, Amiek Soemarmi; Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Karanganyar (Studi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini). Penelitian ini menyatakan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar berhak mengelola alokasi bantuan ke wilayahnya sesuai dengan kebijakan, dengan catatan jumlah satuan yang mendapatkan bantuan tidak boleh kurang dari jumlah yang ditetapkan. Penggunaan dana bantuan harus mengacu pada ketentuan

69

- dan aturan sebagaimana tertuang dalam akad kerjasama dan Petunjuk Teknis BOP PAUD.
- f.Fitriani, Jauhar Arifin, Rahmi Hayati; Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Pendidikan di Taman Kanak Kanak Tunas Harapan Pamarangan Kiwa. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penggunaan dana BOP sudah efektif, efesien, transparan, adil, akuntabel, kepatutan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua anak-anak dan orang tua murid.
- g. Ika Nurul Qamari, Leli Joko Suryono; Peningkatan Kualitas Layanan Dan Tata Kelola Pendidikan Anak Usia Dini Kenanga Panggung Harjo, Sewon, Bantul. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa program BOP membantu dalam peningkatan kualitas layanan PAUD.

METODE PENELITIAN

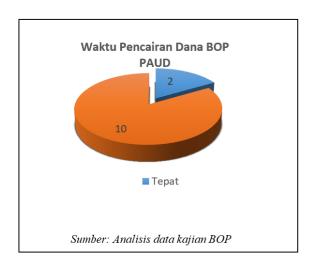
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh jenis layanan PAUD yang telah memperoleh dana BOP minimal 2 tahun (2018 dan 2019). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 1106 lembaga PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia. Responden dalam penelitian adalah kepala satuan lembaga PAUD atau pengelola BOP. Data dijaring melalui teknik penyebaran angket yang disebarluaskan secara online melalui *google form* dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT). Data kuantitatif terkait dengan ketepatan dan mekanisme penerimaan BOP PAUD, penggunaan atau pemanfaatan dana BOP PAUD, dampak BOP, dan kontribusi BOP dalam keseluruhan biaya penyelenggaraan lembaga PAUD. Sementara untuk data kualitatif, pendalaman data dilakukan dengan diskusi kelompok terpumpun (DKT) di 12 daerah dengan metode stratified random sampling dengan kriteria jumlah penerimaan BOP (kecil, sedang, dan besar). Narasumber yang terlibat berasal dari Dinas Pendidikan, pengelola PAUD, dan pengawas PAUD, dan topik diskusi terkait dengan ketepatan penerimaan dana, pemanfaatan dana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan kontribusi BOP dalam penyelenggaraan PAUD.

Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kuntitatif sebagai metode utama dan metode kulitatif menjelaskan dan mendukung lebih dalam hasil dari analisis terhadap data kuantitatif (Creswell dalam Sugiyono, 2011:409). Analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk persentase. Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan, mengkategorikan, dan menginterpretasikan data yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketepatan Waktu Penerimaan Dana BOP PAUD

Ketepatan waktu pencairan dana BOP PAUD tahun 2019 di 12 wilayah sampel secara umum tidak tepat waktu dan terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain akurasi data siswa tidak sesuai, yaitu antara data saat pengajuan dengan data pada masa pencairan dana, proses atministrasi dan birokrasi di daerah yang memerlukan banyak pengesahan, pergantian pejabat di derah, dan peraturan daerah terkait dengan dana hibah. Terkait dengan permasalah tersebut diperlukan sinkronisasi antara operator data dapodik dan pihak-pihak terkait di daerah.



Gambar 1. Persepsi Ketepatan Waktu Pencairan Dana BOP PAUD

Keterlambatan pencairan dana sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan PAUD. Untuk menutupi keterlambatan dana BOP PAUD, para pengelola PAUD banyak mencari pinjaman agar aktivitas pembelajaran dapat berjalan, karena dana BOP merupakan dana andalan dalam penyelenggaran PAUD. Akibat lainnya dari keterlambatan pencairan dana BOP PAUD adalah dampak pada surat pertanggungjawaban penggunaan dana BOP yang hanya diberikan 2 minggu setelah dana BOP cair dan diterima, sehingga hal ini cukup menyulitkan.

Untuk besaran dana BOP, secara umum dana yang diterima oleh lembaga telah sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada di satuan PAUD yaitu sebesar Rp. 600.000,- per peserta didik. Jika ada perbedaan jumlah peserta didik dengan jumlah yang diterima, hal tersebut dialami oleh sebagian kecil lembaga yang disebabkan karena data terbaru jumlah peserta didik belum diperbaharui dalam sistem dapodik sehingga pada saat cut off data sebagai dasar pencairan dana masih menggunakan data lama. Kendala lain adalah operator dapodik PAUD umumnya masih banyak yang merupakan tenaga bantuan dari Dinas Pendidikan. Selisih dana antara jumlah siswa dengan yang diterima ini umumnya tidak banyak, hanya dua sampai tiga siswa saja, sehingga tidak berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran karena masih dapat ditutupi dengan subsidi silang dari sumber dana lainnya, terutama dari iuran bulanan dari orang tua

Perhitungan pencairan dana BOP didasarkan pada jumlah peserta didik yang tercatat dalam data pokok pendidikan PAUD per akhir bulan September tahun anggaran sebelumnya. Hal ini kurang tepat karena rawan menimbulkan ketidaktepatan jumlah siswa dengan penerimaan dana yang diakibatkan terdapatnya selisih jumlah siswa pada suatu satuan PAUD. Dengan demikian akan lebih akurat jika dasar pemberian dana BOP adalah data jumlah siswa pada awal tahun ajaran yang sedang berlangsung.

Temuan ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Waluyo Basuki, dkk (2019) yang menyatakan bahwa penerimaan BOP tidak tepat waktu. Jika dilihat kesesuaian dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2019, keterlambatan pencairan menjadi tidak sesuai dengan prinsip penggunaan dana BOP yaitu efisien dan efektif. Ketidaksesuaian dengan kedua prinsip ini karena keterlambatan dana ini menyebabkan tidak tercapainya sasaran

yang telah ditetapkan sesuai waktu yang ditentukan dalam RKS. Selain itu manfaat yang dicapai tidak optimal sesuai dengan rencana, mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh lembaga untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan selama BOP belum cair. Hal tersebut menjadikan BOP tidak efektif dalam membantu oprasioanalisasi penyelenggaraan PAUD.

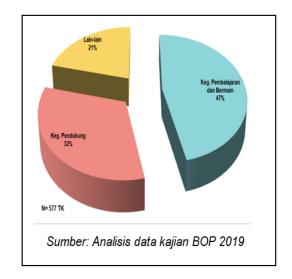
B. Pemanfaatan Dana BOP PAUD

Pemanfaatan dana BOP PAUD secara umum untuk semua satuan PAUD belum sesuai dengan petunjuk teknis, baik untuk TK, KB, SPS, maupun TPA. Pada petunjuk teknis BOP PAUD tahun 2019 disebutkan dana BOP untuk kegiatan pembelajaran dan bermain minimal 50%, kegiatan pendukung maksimal 35%, dan kegiatan lainnya maksimal 15%. Lebih lanjut disampaikan pemanfaatan dana BOP pada masing-masing satuan PAUD sebagai berikut.

Pemanfaatan Dana BOP di Taman Kanak kanak

Pemanfaatan dana BOP untuk kompenen kegiatan pembelajaran dan bermain di TK rata-rata hanya sebesar 47 %, lebih kecil jika dibandingkan dengan juknis yang minimal 50%. Dari 47% untuk kegiatan pembelajaran dan bermain, sebesar 29% digunakan untuk bahan pembelajaran tematik, dan Alat Permainan Edukatif (APE) 21%. Untuk kegiatan pendukung, proporsi dana yang digunakan sebesar 32% sedangkan pada juknis yaitu sebesar maksimal 35%. Sedangkan untuk kegiatan lainnya realisasi pemanfaatan sebesar 21%, sedangkan di juknis maksimal hanya 15%.

Ketidak sesuaian pemanfaatan dana antara petunjuk teknis dengan pemanfaatan riil yang ada di TK dikarenakan pembiayaan yang paling besar sebetulnya untuk komponen honor guru yang belum tercakup dalam juknis, sehingga banyak TK swasta menambah transpor guru menggunakan komponen lain-lain yang dapat dialokasikan untuk menambah honor guru. Sementara untuk kegiatan pembelajaran banyak TK swasta kecil menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan sehingga biayanya dapat ditekan.

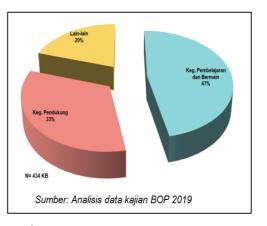


Gambar 2. Proporsi Penggunaan Dana BOP PAUD di TK

Kondisi ini perlu kiranya mendapat perhatian baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar memberikan tambahan honor guru, mengingat honor guru TK khusunya guru-guru TK swasta kecil, masih sangat rendah.

2. Pemanfaatan Dana BOP di Kelompok Bermain

Pemanfaatan dana BOP untuk Kelompok Bermain juga hampir sama dengan di TK. Pemanfaatan pada komponen pembelajaran dan bermain sebesar 47%, lebih kecil dari petunjuk teknis yang seharusnya minimal 50%. Pemanfaatan dana untuk kegiatan pendukung sebesar 33%, sedangkan di petunjuk teknis yaitu maksimal 35%. Untuk kegiatan lainnya, dana yang dimanfaatkan lebih besar dari petunjuk teknis yakni 20%, sementara pada petunjuk teknis maksimal sebesar hanya 15%.

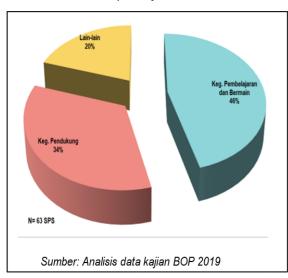


Gambar 3. Proporsi Penggunaan Dana BOP PAUD di KB

Ketidak sesuaian pemanfaatan dana antara petunjuk teknis dengan pemanfaatan dana di KB dikarenakan pembiayaan yang paling besar sebetulnya untuk komponen honor guru sama dengan di TK yang belum tercakup dalam juknis, sehingga banyak satuan KB untuk menambah transpor guru menggunakan komponen lainlain yang dapat dialokasikan untuk menambah honor guru. Untuk kegiatan pembelajaran dapat dikurangi banyak dengan memanfaatkan bahanbahan yang ada di sekitar lingkungan yang biayanya lebih murah.

3. Pemanfaatan Dana BOP di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS)

Pemanfaatan dana di Kelompok SPS untuk komponen pembelajaran dan bermain juga lebih kecil jika dibandingkan dengan di petunjuk teknis yakni sebesar 46%, sementara pada juknis minimal 50%. Untuk kegiatan pendukung, pemanfaatannya sebesar 34%, sedangkan di juknis maksimal 35%. Sementara untuk kegiatan lainnya lebih besar dari juknis yakni sebesar 20%, sementara di petunjuk teknis minimal 15%.



Gambar 4. Proporsi Penggunaan Dana BOP PAUD di SPS

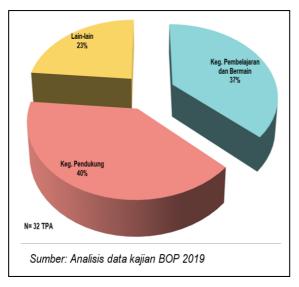
Ketidaksesuaian pemanfaatan dana antara petunjuk teknis dengan pemanfaatan dana di SPS dikarenakan pembiayaan yang paling besar sebetulnya pada komponen honor guru sama dengan di TK dan KB yang selama ini belum tercakup dalam juknis, sehingga banyak satuan SPS untuk menambah transpor guru menggunakan komponen lain-lain. Untuk

72

kegiatan pembelajaran SPS tidak setiap hari ada kegiatan belajar sehingga biaya kegiatan pembelajaran dapat dikurangi dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan yang biayanya lebih murah.

4. Pemanfaatan Dana BOP di TPA

Pemanfaatan dana BOP untuk TPA pada komponen pembelajaran dan bermain sebesar 37% lebih kecil dari juknis yang sebesar minimal 50%. Dari jumlah itu sebanyak 48% digunakan untuk bahan pembelajaran tematik, APE 33% dan penyediaan alat 19%. Untuk kegiatan pendukung proporsi dana yang digunakan sebesar 40%, lebih besar dari juknis maksimal 35%. Sementara untuk kegiatan lain-lain sebesar 23% sementara di juknis maksimal 15%.



Gambar 5. Proporsi Penggunaan Dana BOP PAUD di TPA

Banyaknya penggunaan dana BOP di satuan PAUD belum sesuai dengan juknis dikarenakan pada juknis penggunaan sangat mengikat dan bentuknya seragam, sedangkan kebutuhan satuan PAUD pada masing-masing lembaga berbeda, misalnya untuk pembelian APE PAUD yang sudah mempunyai APE tidak akan dibelikan APE lagi karena jumlahnya sudah banyak sehingga dialihkan ke hal lain yang lebih bermanfaat. Demikian pula untuk obat-obatan jika masih tersedia juga tidak dibelikan lagi dan dialihkan pada hal lainnya, seperti untuk tambahan honor guru yang dirasa masih sangat kurang.

Pemanfaatan dana BOP dari seluruh satuan PAUD belum sesuai dengan petunjuk teknis, khususnya untuk komponen pembelajaran dan bermain dan komponen lain-lain. Untuk komponen pembelajaran dan bermain lebih kecil dari juknis, sementara untuk komponen lain-lain lebih besar dari juknis. Belum sesuainya antara pemanfaatan dana dengan juknis disebabkan oleh kebutuhan satuan PAUD yang beragam berdasarkan aktivitas kegiatannya. Kesamaannya adalah pada honor guru yang memerlukan dana paling besar sementara belum terdapat pada juknis.

Hasil kajian ini terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Waluyo Basuki, dkk (2019) yang menyatakan bahwa sebesar 60% dana BOP hanya digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan sisanya sebesar 40% digunakan untuk biaya non operasional. Temuan dalam penelitian ini meenunjukkan kebutuhan operasional dibiayai dengan rata-rata besaran 33% dari keseluruhan BOP yang diterima.

C. Dampak BOP dalam Penyelenggaraan PAUD

1. Peningkatan Mutu Pembelajaran

Dana BOP secara tidak langsung cukup efektif dalam membantu meningkatkan mutu pembelajaran. Indikasinya adalah melalui dana BOP satuan PAUD yang semula kekurangan sarana pembelajaran dapat terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan sarana dalam penyelenggaran pembelajaran berpengaruh terhadap situasi pembelajaran dan memotivasi guru dan anak dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, satuan PAUD yang semula tidak mempunyai APE sebagai sarana bermain dapat terpenuhi. Alat permainan edukatif merupakan sarana yang sangat penting dalam membantu tumbuh kembang anak, karena perkembangan motorik anak akan banyak dipengaruhi oleh pemberian stimulus diantaranya adalah melalui bermain.

Pemenuhan APE menjadi unsur utama dalam pembelajaran di PAUD, sehingga tenaga pendidik dan penyelenggara/pengelola satuan PAUD dapat mengantisipasi dengan melengkapi sarana belajar melalui berbagai inovasi atau kreasi guru yang dapat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar lingkungan sebagai sarana belajar, sehingga tidak hanya membeli dari bahan

pabrikan. Dengan demikian kelebihan dana bahan habis pakai dapat dimanfaatkan satuan PAUD untuk penggunaan kegiatan pembelajaran dan bermain lainnya.

Terkait dengan pemenuhan sarana, melalui diskusi, para guru PAUD juga menyampaikan agar dana BOP dapat digunakan untuk membeli laptop sebagai pendukung kegiatan pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran yang menunjukkan suatu obyek yang tidak pernah dilihat anak di lingkungan sekitarnya. Bantuan media komputer/laptop ini dapat membantu menunjukkan pada anak-anak hal yang tidak ada di lingkungan sekitar.

2. Peningkatan Akses Siswa Miskin

Kontribusi BOP terhadap perkembangan jumlah siswa PAUD untuk semua satuan PAUD cukup baik. Rata-rata terdapat peningkatan walaupun persentasinya masih kecil. Hal ini dikuatkan oleh Dinas Pendidikan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT), bahwa dengan adanya BOP banyak satuan PAUD baru yang didirikan oleh masyarakat, terutama untuk daerah-daerah yang semula terbatas layanan PAUD-nya, saat ini siswanya semakin bertambah. Peningkatan untuk siswa TK sebesar 4%, KB 6%, SPS 3% dan TPA sebesar 8%. Peningkatan jumlah siswa PAUD untuk TPA tergolong paling tinggi diantara satuan PAUD lainnya. Hal ini dikarenakan banyaknya pasangan usia muda yang keduanya bekerja dan tidak mempunyai asisten rumah tangga sehingga menitipkan anaknya di TPA.

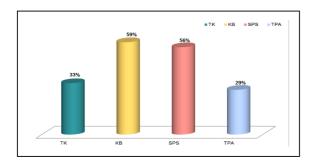
Peningkatan jumlah siswa ini diakui oleh penyelenggara lembaga tidak serta merta membawa peningkatan terhadap akses siswa miskin, bahkan di Kota Batu diakui bahwa sangat kesulitan mencari siswa miskin. Di sebagian besar daerah, akses siswa miskin pada satuan PAUD jumlahnya juga sedikit hanya ada 2-3 siswa per satuan PAUD. Layanan PAUD terhadap siswa kurang mampu di satuan PAUD umumnya memiliki kebijakan subsidi silang dan pemberian keringanan biaya seperti pemberian potongan iuran bulanan, bantuan seragam dari alumni dan cicilan pembayaran uang seragam selama 1 tahun. Dari hasil diskusi kelompok terpumpun, siswa yang diberikan bantuan sepenuhnya dari dana BOP umumnya adalah anak yatim.

3. Meringankan Beban Orang Tua Siswa

Dana BOP membantu meringankan beban biaya yang dikeluarkan oleh orang tua murid. Dari hasil diskusi kelompok disampaikan bahwa BOP PAUD sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang semula disediakan oleh orang tua seperti kegiatan visual dan praktik setelah mendapat BOP dapat dipenuhi dengan menggunakan dana BOP. Hal ini telah sesuai dengan salah satu tujuan BOP PAUD yang tertuang dalam petunjuk teknis yaitu membantu meringankan beban biaya yang ditanggung oleh orang tua. Dampak BOP PAUD dalam membantu meringankan beban orang tua juga sejalan dengan hasil penelitian Waluyo Basuki, dkk (2019) dan penelitian Emilda Sulasmi (2020), bahwa BOP PAUD membantu meringankan beban orangtua.

D. Kontribusi BOP PAUD terhadap Penyelenggaraan PAUD

Berdasarkan hasil survey di satuan PAUD, bantuan dana BOP cukup efektif dalam membantu menutupi kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan PAUD. Kontribusi BOP dalam penyelenggaraan PAUD untuk TK rata-rata sebesar 33% dari seluruh penyelenggaraan, KB 59%, SPS 56% dan TPA 29%.



Gambar 6. Kontribusi BOP dalam Penyelenggaraan PAUD

Sumber: Analisis data Kajian BOP PAUD 2019

Kontribusi BOP untuk penyelenggaraan operasional di TPA baru 29 persen dari seluruh biaya operasional di TPA. Ini karena biaya di TPA tergolong tinggi jika dibandingkan dengan satuan PAUD lainnya, sehingga TPA harus memenuhi kekurangan biaya operasional penyelenggaraan TPA sebesar 71 persen. Kekurangan biaya

operasional satuan PAUD umumnya dipenuhi dengan iuran SPP dari orangtua dengan jumlah bervariasi. TK swasta yang dikelola oleh masyarakat/yayasan memungut uang SPP dengan besaran bervariasi, mulai Rp 50.000, - hingga diatas Rp 250.000, -. Besarnya pungutan/iuran bulanan ini tergantung pada besar-kecilnya yayasan yang menaungi. Di beberapa wilayah Kab/ Kota ada batasan maksimal besarnya iuran bulanan yang diperbolehkan ditarik dari orangtua. Di Kota Batu misalnya, besar iuran yang diperbolehkan ditarik dari orangtua tidak melebihi Rp 150.000,-.

Kekurangan biaya operasional untuk KB dan SPS dipenuhi dengan memungut uang SPP/ iuran bulanan pada orangtua anak. Besaran uang SPP tergantung kondisi lembaga, mulai dari Rp 10.000.- sampai Rp 50.000.- per anak per bulan. Perbedaan iuran bulanan yang dibebankan kepada orangtua antara lembaga TK dengan KB dan SPS jelas menunjukkan kondisi status sosial ekonomi peserta didik yang dilayani di masing-masing satuan jenis layanan PAUD. Sebagian besar peserta didik yang terdapat pada lembaga SPS berlatar belakang ekonomi rendah, sehingga penyelenggara lembaga tidak bisa membebankan iuran yang terlalu banyak kepada orangtua siswa. Adanya BOP PAUD sangat membantu meringankan beban orangtua dalam menyekolahkan anaknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dana BOP PAUD cukup efektif dalam membantu penyelenggaran operasional PAUD, meningkatkan kegiatan pembelajaran, dan meringankan beban pembiayaan orang tua siswa. Dana BOP juga membantu meningkatkan jumlah siswa di semua satuan PAUD walaupun jumlahnya relatif kecil pada masing-masing PAUD, yaitu TK 4%, KB 6%, SPS 3%, dan TPA sebesar 8%. Dana BOP juga berkontribusi positif dalam penyelenggaraan program PAUD, bahkan banyak lembaga yang mengandalkan dana BOP sebagai dana utama karena iuran dari orang tua sangat kecil. Kontribusi dana BOP dalam penyelenggaraan PAUD pada masing-masing satuan adalah sebesar 59% untuk KB, SPS sebesar 56%, TK 33% dan TPA sebesar 29%.

Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan program ke depan yaitu.

- Pencairan dana BOP di 12 wilayah penelitian sebagian besar tidak tepat waktu, umumnya disebabkan perbedaan data ketika pendataan dan penyaluran. Hal ini terkait faktor-faktor berikut: kompetensi operator disatuan PAUD, birokrasi di daerah, pergantian pejabat di daerah, dan perubahan mekanisme peyaluran dana BOP dari satu tahap penyaluran pada tahun 2018 menjadi 2 tahap tahun 2019, sehingga banyak satuan PAUD dan pemerintah daerah belum memahami sepenuhnya.
- 2. Pemanfaatan dana BOP PAUD di semua jenis satuan PAUD belum sesuai dengan juknis. Rata-rata proporsi pemanfaatan dana untuk komponen kegiatan pembelajaran lebih rendah dari juknis, sedangkan untuk komponen kegiatan pendukung dan kegiatan lainnya melebihi juknis. Faktor penyebab adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan satuan PAUD dan rincian komponen pada juknis.
- 3. Dampak BOP terhadap penyelenggaraan PAUD cukup baik, namun layanan akses terhadap siswa miskin dengan membebaskan biaya pendidikan masih kurang. Siswa PAUD dari keluarga miskin umumnya hanya diberikan potongan biaya.
- 4. Kontribusi dana BOP di satuan PAUD sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan jumlahnya, khususnya untuk kegiatan pendukung dan honor guru, karena honor guru PAUD saat ini masih sangat kecil, dan belum ada pada komponen juknis.

Rekomendasi

 Direktorat Pembinaan PAUD perlu melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan PAUD dalam rangka sinkronisasi data. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada para operator di satuan PAUD dengan melibatkan unsur dinas pendidikan agar tidak terjadi perbedaan data ketika cut off dengan data ketika pencairan dana. Untuk mengatasi keterlambatan pencairan dana perlu dilakukan perubahan mekanisme transfer dana, yang semula melalui transfer daerah dapat dilakukan melalui transfer

- langsung ke satuan PAUD. Pemerintah daerah perlu menyederhanakan pengesahan dokumen terkait dengan pencairan dana BOP dengan mengurangi jumlah pejabat dalam pengesahan dokumen.
- 2. Direktorat Pembinaan PAUD perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan BOP PAUD yang mudah dipahami dan fleksibel dalam penggunaan terkait dengan besaran proporsi komponen penggunaan dana yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan PAUD, karena kebutuhan dana pada satuan PAUD cukup beragam.
- Satuan PAUD perlu meningkatkan akses siswa miskin, yaitu dengan membebaskan biaya pendidikan minimal 2 peserta didik dalam satu rombongan belajar agar semakin banyak siswa miskin yang dapat terlayani PAUD.
- 4. Kontribusi BOP PAUD dalam membantu penyelenggaraan PAUD saat ini sebesar 33%, sehingga perlu ditingkatkan agar layanan PAUD semakin baik khusunya terkait dengan tambahan honor guru yang belum ada pada komponen juknis. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peran pemerintah, dan kerjasama dengan kementerian desa dalam penyelenggaraan PAUD melalui sinkronisasi alokasi dana pemerintah, pemerintah daerah dan dana desa.

PUSTAKA ACUAN

- Aisyah, Siti. 2011. Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Anonim. 2016. *Penjelasan Juknis BOP PAUD 2016*. http://bangimam-berbagi.blogspot. co.id/2016/02/juknis-bop-paud-2016. html diunduh 4 September 2016.
- Arna Ristiyanti Tarida, S.Si. 2019. Analisis Efektivitas Program BOP PAUD Pada Satuan Pendidikan Tahun 2018. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai. 2013. Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepualauan Talaud. *Acta Diurna*, vol. - (-): 1-23
- Daftar penerima Bansos atau BOP PAUD tahun 2016. http://www.volimaniak.com/2016/03/daftar-penerima-bansos-atau-bop-paud.html. Diunduh 4 September 2016.
- Direktorat Pembinaan PAUD. 2019. *Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta:

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Pembinaan PAUD. 2016. *Data Pokok Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini*.

 Jakarta: Kementerian Pendidikan dan

 Kebudayaan.
- Emilda Sulasmi. 2020. Evaluation of the Operational Assistance Management (BOP) Management Funding Program At The Bengkulu City PAUD Institution. Indonesian Journal of Education and Mathematical Science, Vol 1 No 1.
- Erfy Melani Lalupanda. 2019. Evaluasi Implementasi Program BOP PAUD. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*, Volume 3.
- Felayati dan Yaswinda. 2020. Penerapan Model Evaluasi CIPPO dalam Mengevaluasi Penyelenggaraan Lembaga PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4 (1).

- Fitriani, Jauhar Arifin, Rahmi Hayati. 2019. Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Di Taman Kanak Kanak Tunas Harapan Pamarangan Kiwa. JAPB, Vol. 2, No. 2
- Florentina Reni Swastika, Indarja, Amiek Soemarmi. 2016. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Di Kabupaten Karanganyar (Studi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini). *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3.
- Hamzah, Amriani. 2013. *Perilaku Organisasi*. Makasar: Universitas Negeri Makasar.
- Ika Nurul Qamari, Leli Joko Suryono. 2017. Peningkatan Kualitas Layanan Dan Tata Kelola Pendidikan Anak Usia Dini Kenanga Panggung Harjo, Sewon, Bantul. *Jurnal BERDIKARI*, Vol.5 No.2 Agustus.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. APK/APM PAUD, SD, SMP,dan SM termasuk Madrasah dan Sederajat. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Masnipal. 2013. *Siap Menjadi Guru dan Pengelola Profesional*. Jakarta: PT. Efek Media Komputindo.
- Morrison, G. S. 2008. *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. diterjemahkan oleh Suci
 Ramadhona. 2012. Jakarta: PT Indeks.
- Mulyasa, E. 2002. *Manajemen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. 2010. Konsep Pembiayaan Pendidikan Berbasis Sekolah. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Jakarta: Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasonal PAUD. Jakarta: Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana

- BOP Penyelenggaraan PAUD. Jakarta: Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana BOP Penyelenggaraan PAUD. Jakarta: Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan
- Rahayu, Nur'aini, 2015. Peningkatan Mutu Pendidikan Di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fatimah Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Tesis. Surakarta: Program Pasca Sarjana, IAIN Surakarta.
- Rahayu, Subagyo 2019. Implementasi Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada TK Negeri di Kabupaten Sleman. Yogyakarta: Tesis STIE Widya Wiwaha.
- Santrock, John W. 2011. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Schunk, Dale H. 2012. *Teori-teori Pembelajaran:**Perspektif Pendidikan. Yogyakarta:

 *Pustaka Belajar.
- Siagian, Sondang. P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, Richard. M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sujiono, Bambang. 2012. *Metode Pengembangan Fisik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Susanto, A. 2011. *Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suyadi (2010). *Psikologi Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta : PT Pustaka Insan
 Madani.
- Tedjawati, 2012. Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 5 (2), hlm. 227-238.
- Tedjawati, 2013. *Pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 19 (3), hlm. 346-363.

- Trianto. 2011. Pengembangan Pembelajaran Tematik Bagi Anak Usia Dini TK/RA & Anak Usia Kelas Awal SD/MI. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNICEF. 2009. Holistic ECD for All in Indonesia: Supporting Communities to Close the Gap (PAUD Holistik Untuk Semua di Indonesia: Mendukung Masyarakat dalam Menjembatani Kesenjangan).
- Waluyo Basuki, Zamrotul Khasanah, Farida Widyawati, Aniek Sugianti. 2019. Evaluasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD di Jawa Tengah Tahun 2018. Jurnal PAUD & DIKMAS, Edisi Juni.
- Yamin, Martinis. dan Sanan, Jamilah, S. 2012.

 Panduan Pendidikan Anak Usia Dini.

 Jakarta: GP Press.